REVISI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L K j I P)

TAHUN 2023

KANTOR KECAMATAN WILANGAN

KABUPATEN NGANJUK

JALAN RAYA MADIUN NOMOR 38 WILANGAN KODE POS 64462

TELEPON / FAX : EMAIL : kecamatan.wilangan@gmail.com

KATA PENGANTAR

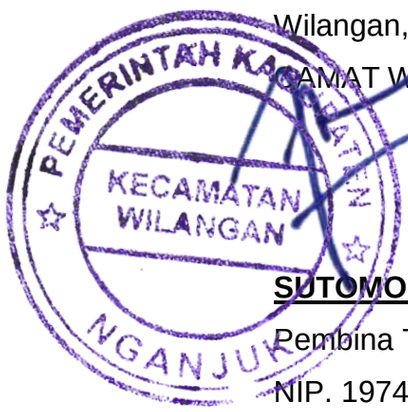
Puji syukur kami munajatkan kehadlirat Allah SWT. atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wilangan Tahun 2023 .Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2023 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Wilangan Tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Wilangan dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Wilangan. Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran , masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Wilangan, 07 Pebruari 2024

CAMAT WILANGAN



SUTOMO, S.SOS, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19740802 199803 1 005

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.1.1. Maksud dan Tujuan 2

1.1.2. Gambaran Umum 2

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Struktur Organisasi 4

1.3.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Wilangan 4

1.3.2. Sumber Daya Kecamatan Wilangan 10

1.4. Isu-Isu Strategis 12

1.4.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wilangan 12

1.4.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 14

1.4.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur 16

1.4.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 17

1.4.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 19

1.5. Sistematika Penulisan 21

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 22

2.1. Ikhtisar/ringkasan Renstra/Renja 22

2.1.1. Program dan Kegiatan 22

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 32

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 32

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 33

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-tahun sebelumnya 36

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standard Nasional 38

3.1.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja 39

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumer Daya 40

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja 41

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023 47

BAB IV PENUTUP 53

4.1. KESIMPULAN 53

4.2. SARAN 53

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilain akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintahyang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiaptahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Wilangan Kabupaten

Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LkjIP Kecamatan Wilangan Tahun 2023 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Wilangan bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Review Rencana Strategis Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Wilangan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja,Pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

1.1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

b) Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalanpelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan;

c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintahuntuk meningkatkan kinerjanya.

1.1.2. Gambaran Umum

Kecamatan Wilangan memiliki luas wilayah 49,09 km2 yang sebagian besar terdiri dari kawasan sawah 1160 Ha, pertanian bukan sawah 3442 Ha, dan bukan pertanian 462 Ha, serta terdiri dari 6 Desa dengan luas daerah

Sudimoroharjo	:	20,80 km2
Ngadipiro	:	10,88 km2
Wilangan	:	6,30 km2
Mancon	:	6,37 km2

Ngudikan	:	1,62 km2
Sukoharjo	:	3,12 km2

Kecamatan Wilangan memiliki jumlah 62 RW dan 178 RT, dengan jumlah penduduk sejumlah 37.031 jiwa yang terdiri dari laki-laki 18.730 jiwa, perempuan 18.301 jiwa.

Secara administratif Batas-batas Wilayah Kecamatan Wilangan adalah sebagai berikut :

Utara	: Kec. Rejoso,
Timur	: Kec. Bagor,
Selatan	: Kec. Sawahan,
Barat	: Kab. Madiun

Wilayah kerja Kecamatan Wilangan terdiri dari 6 Desa, 62 RW dan 178 RT yaitu :

No	Desa	RT	RW
1	Sudimoroharjo	35	16
2	Ngadipiro	21	4
3	Wilangan	36	8
4	Mancon	33	13
5	Ngudikan	28	9
6	Sukoharjo	25	12
Jumlah		178	62

Sumber data : Aplikasi Sedudo Administras Kependudukan Kecamatan Wilangan Tahun 2023

1.2 Landasan Hukum

a) Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;
b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3 Struktur Organisasi

1.3.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Wilangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Wilangan.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

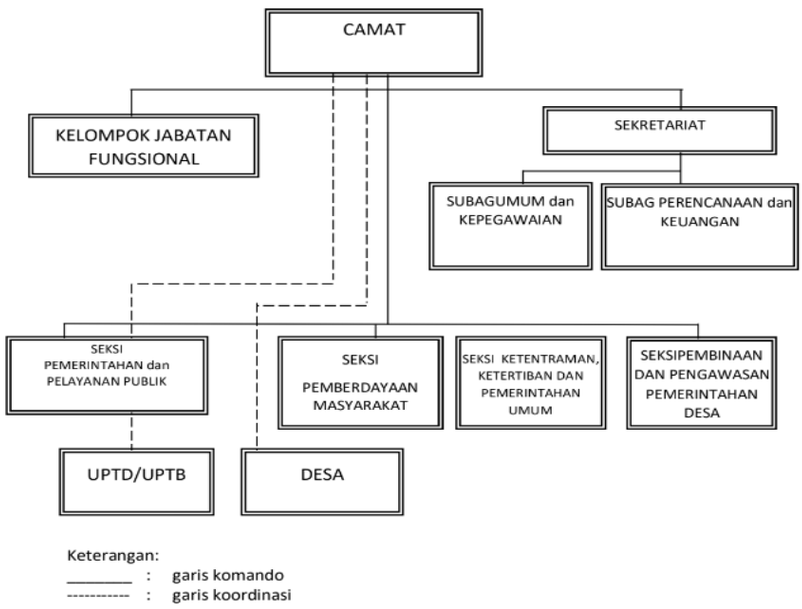
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. StrukturOrganisasi

Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata KerjaKecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan;

c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. pelaksanaan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
b. Pengelolaan urusan keuangan;
c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat, membawahi:
    a. Subbagian Umum;
    b. Subbagian Program, Evaluasi, dan Keuangan;
(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Tata Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah:

a. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikat terkait;
b. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

a. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;

c. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa/ kelurahan;
e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di desa/ kelurahan;
f. Melaksanakan evaluasi desa/kelurahan; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintah Umum

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Pemerintah Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintah Umum adalah:

a. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokok agama dan tokok masyarakat;
d. Melaksanakan kooordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara RI;
e. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasioanal;
h. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

j. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dan / kelurahan

Fungsi dari Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa adalah :

a. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepada desa;
g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa;
h. Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. Melaksanakan fasilitasi penetapan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

n. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Sumber Daya Kecamatan Wilangan

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Wilangan adalah sebagai berikut :

1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Wilangan sebanyak 8, yang terisi sebanyak 7 jabatan struktural yang belum terisi 1 Kasubbag Umum dan Kepegawaian, dibantu oleh 6 orang staf dan tenaga THL 8 Orang. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3.2.a.1 Pegawai Pada Kantor Kecamatan Wilangan Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	4
4.	Kasubbag	1
5.	Staf/PNS	6
6.	THL	8
	Jumlah	21

1.2. **Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang**

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Wilangan sebagai berikut :

Tabel 1.3.2.a.2 Pegawai Pada Kantor Kecamatan Wilangan Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2023

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	-
3.	Penata Tingkat I	III/d	3
4.	Penata	III/c	3
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	-
6.	Penata Muda	III / a	5
7.	Pengatur Tk.I	II/d	-
8.	Pengatur	II/c	-
9.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1
		Jumlah	13

1.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Wilangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 1.3.2.a.3 Pegawai Pada Kantor Kecamatan Wilangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2023

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	1
2.	S1	5
3.	D3	2
4.	SMA	5
5.	SMP	0
	JUMLAH	13

1.4. Isu-Isu Strategis

1.4.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wilangan

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Wilanganmenggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal
   a. Faktor Kekuatan (Strong)
      1) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
      2) Pola kerja di Kecamatan Wilangan yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
      3) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
      4) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
      5) SDM Aparatur Kecamatanyang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

   b. Faktor Kelemahan (Weakness)
      1) Kurangnya pegawai di OPD Kecamatan Wilangan;
      2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
      3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
      4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.

5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;
5) Ditetapkannya Peraturan Daerah Nganjuk Nomor … Tahun … tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (Threat)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Wilangan;
4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Tabel 1.4.1 Pemetaan Permasalahan untuk Pementuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	• Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarkat terhadap pelayanan public masih kurang	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kurangnya wawasan dan pengetahuan personil dalam manajemen pelayanan publik
2		• Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
3		• Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

1.4.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (imaginable), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (desirable), memungkinkan untuk dicapai (reachable), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (communicable) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (understandable). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi

dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan.

Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana

Kantor Kecamatan Wilangan sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangantangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kantor Kecamatan Wilangan dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di misi ke-2 (dua). Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Wilangan memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

1.4.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Wilangan, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Demikian telaahan Renstra Kementerian/Lembaga agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Wilangan harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi kecamatan.

1.4.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030, maka Kecamatan Wilangan termasuk sebagai kawasan yang strategis jika ditinjau dari :

a. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka Kecamatan Wilangan sebagai pusat pengembangan kecamatan (Pasal 9)
b. Sistem jaringan transportasi, maka jalan kecamatan Wilangan termasuk jalan provinsi dan jalan kabupaten yang merupakan jalan kolektor dan local primer/sekunder (pasal 12), dimana jalan di kecamatan Wilangan sebagai penghubung dengan jalan Propinsi di Kecamatan Bagor-Wilangan, dan sebagai jalan penghubung antar kabupaten, yaitu Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun
c. Rencana system jaringan energy, maka kecamatan Wilangan berpotensi sebagai sistem jaringan energy khususnya jaringan pipa gas yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen khususnya pada kegiatan industry (Pasal 13)
d. Sistem jaringan sumber daya air khususnya system pengembangan waduk dan embung, penyediaan sumber daya air bersih, dan pengembangan system jaringan air bersih (Pasal 15),
e. Kawasan lindung khususnya kawasan rawan bencana alam (Pasal 23), yaitu bencana banjir Desa Manggarejo dimana kecamatan Wilangan dilalui oleh sungai dari Hutan yang rawan banjir
f. Kawasan budidaya hutan produksi dan hutan rakyat (Pasal 26 dan 27)
g. Kawasan peruntukan pertanian khususnya peternakan (Pasal 28).
h. Kawasan peruntukan pertambangan dan perindustrian (Pasal 30 dan 31),

Dari adanya potensi tersebut diatas, diharapkan Kecamatan Wilangan menjadi kawasan yang dapat diandalkan keberadaannya diwilayah kabupaten Nganjuk. Disamping mentelaah Renstra berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan

suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarus-utamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan

KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi

menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Taun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Kecamatan Wilanganmerupakan wilayah yang Produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan juga pengawasan lingkungan hidup terkait dengan semakin banyaknya perindustrian di Kecamatan Wilangan yang diharapkan dengan adanya pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup tersebut dapat menekan dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan hidup.

1.4.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada BAB II Sub Bab 2.4 tentang Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Wilangan telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Wilangan, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah*. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah*. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) *Pelayanan Prima*. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentupnya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
4) *Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur*. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur
5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1.5. Sistematika Penulisan

LKJIP Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. Landasan Hukum

1.3. Struktur Organisasi

1.4. Isu-Isu Strategis

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Ikhtisar/ringkasan Renstra/Renja

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

4.2. SARAN

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Ikhtisar/ringkasan Renstra/Renja

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah “Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan”, adapun sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat”, “Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban”, “Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik” dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Wilangan

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Baik
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2023**
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	98
Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Presentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat. sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	98
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	98

2.1.1. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Tabel 2.1.1. Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**2.035.760.039**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD**	**100%**	**2.000.000**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	2.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Keuangan SKPD**	**100%**	**1.748.310.000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	1.745.310.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 laporan	1.000.000

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai**	**100%**	**7.500.000**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	7.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD**	**100%**	**83.019.400**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	982.400
Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	34.979.750
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2.000.250
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.500.000
Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	42.557.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**38.018.189**
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	3 paket	8.529.300

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
	yang Disediakan		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	29.488.889
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**29.220.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	5.720.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	23.500.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah**	**100%**	**127.692.450**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	23.925.800
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	3.451.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	9.300.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	91.015.150

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**115.460.000**
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Terkoordinirnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**92%**	**86.099.500**
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	86.099.500
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Terkoordinirnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**92%**	**13.533.100**
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	13.533.100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Terkoordinirnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**92%**	**15.827.400**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 laporan	15.827.400

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
Dilimpahkan			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**56.550.300**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terkoordinirnya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**17.825.700**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat daam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyarakatan	17.825.700
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 dokumen	38.724.600
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**22.872.800**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi yang dilaksanakan**	**92%**	**22.872.800**
Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	3 laporan	22.872.800

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**22.890.100**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan**	**92%**	**22.890.100**
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	22.890.100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**86.391.000**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	**Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**86.391.000**

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Pemerintahan Desa**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 dokumen	66.909.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	6.930.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 dokumen	12.480.000
		Jumlah	2.339.852.239

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Wilangan

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja 2023

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Baik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	98

2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Presentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat. sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	98
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	98

No	Program	Anggaran	Target	Keterangan
1.	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Rp. 2.000.000	100 %	APBD 2023
2.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Rp. *1.748.310.000*	100 %	APBD 2023
3.	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	Rp. *7.5000.000*	100 %	APBD 2023
4.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Rp. *83.019.400*	100 %	APBD 2023
5.	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Rp. *38.018.189*	100 %	APBD 2023
6.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Rp. *29.220.000*	100 %	APBD 2023
7.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah*	Rp. *127.692.450*	100 %	APBD 2023
8.	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	Rp. *86.099.500*	92%	APBD 2023

9.	*Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	Rp. *13.533.100*	92%	APBD 2023
10.	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	Rp. *15.827.400*	92%	APBD 2023
11.	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	Rp. *56.550.300*	100%	APBD 2023
12.	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	Rp. *22.872.800*	92%	APBD 2023
13.	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	Rp. *22.890.100*	92%	APBD 2023
14.	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	Rp. *86.319.000*	100 %	APBD 2023
	JUMLAH	Rp. 2.339.852.239		

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Wilangan merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Wilangan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokokdan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Wilangan Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plant) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Wilangan Tahun 2023, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Wilangan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75 % sampai 100 %	Baik
III	55 % sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target dan Realisasi Kinerja pada tahun 2023 ada pada table di bawah ini :

Tabel 3.1.1.. Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Reali-sasi Kinerja Tahun 2023	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	98	84,68	86.41%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	98	88,24	90.04%
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi	Prosentase koordinasi	98%	100%	102,04%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Reali-sasi Kinerja Tahun 2023	Capaian
1	2	3	4	5	6
	tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti			
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	98%	100%	102,04%

Sesuai dengan Renja Kecamatan 2023 dan Perjanjian Kinerja 2023, terdapat 1 (satu) misi dan 1 (satu) tujuan, serta 3 (tiga) sasaran strategis, dengan capaian Tujuan sebesar **86.41%**.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.1.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2021, 2022, 2023.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	98	98	98	63,33	69,09	84,68
2	Meningkatnya	Indeks	98	98	98	74,2	78,2	88,2

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.	Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan				5	9	4
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	98	98	98	39,88	96,99	100
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	98	98	98	4,93	80,11	100

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meskipun belum mencapai target yang ditentukan dikarenakan pada aspek pelayanan Sistem, mekanisme dan prosedur mendapat nilai 82.14 dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan mendapat nilai 84.52. Maka dari itu untuk kedepannya kami akan meningkatkan kembali kinerja pelayanan kecamatan wilangan dalam semua aspek pelayanan publik.

Untuk sasaran Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban pada 2 tahun sebelumnya belum tercapai, tetapi pada akhir

target renstra sudah tercapai dengan jumlah koordinasi yang ditindak lanjuti sebanyak 30 kali dan jumlah koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 30 kali.

Untuk sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik sudah tercapai pada target akhir renstra.

Untuk realisasi kinerja pada tahun 2021, banyak yang tidak tercapai dikarenakan adanya dampak dari wabah COVID-19.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.1.3.1 Target Kinerja Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	90,55	95,66	98	98	98
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	90,55	95,66	98	98	98
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	94,18	98,96	98	98	98
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	99,72	98,96	98	98	98

Tabel 3.1.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun Akhir Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	98	84,68	86.41%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	98	88,24	90.04%
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	98	100	102,04%
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	98	100	102,04%

Dari 3 sasaran ada 1 yang tidak tercapai target akhir renstra yakni Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ini bisa tidak

tercapai dikarenakan adanya beberapa aspek nilai terhadap pelayanan yang dibawah nilai 90.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standard Nasional

Tabel 3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Standard Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standard Provinsi Jatim	Realisasi Kinerja Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	-	84,68
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	85,09	88,24
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	-	100
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	100

Setelah diperoleh perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Wilangan sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi kinerja Kecamatan Wilangan Tahun 2023 dengan standar Jawa Timur, dengan perbandingan 85,09 berbanding

88,24. Maka dengan perbandingan tersebut, Kecamatan Wilangan sudah melebihi target Nasional.

3.1.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Tercapai/Tidak Tercapai
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	86,41%	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	90.04%	Tidak Tercapai
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	102,04%	Tercapai
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	102,04%	Tercapai

Tidak tercapaianya tujuan Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan dikarenakan nilai dari Aplikasi SINCAN 79,85 dan Indikator Manajerial 89,50. Maka untuk kedepannya kami akan lebih meningkatkan kinerja dalam pengadministrasian dan laporan untuk di upload pada aplikasi SINCAN, dan meningkatkan kembali kinerja manajerial kecamatan wilangan sehingga dapat memenuhi target yang telah di tetapkan.

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meskipun belum mencapai target yang ditentukan dikarenakan pada aspek pelayanan Sistem, mekanisme dan prosedur mendapat nilai 82.14 dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan mendapat nilai 84.52. Maka dari itu untuk kedepannya kami akan meningkatkan kembali kinerja pelayanan kecamatan wilangan dalam semua aspek pelayanan publik.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumer Daya

Tabel 3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumer Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	86.41%	91,39%	-4.98%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	90.10%	90.54%	-0.44%
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	102,04%	96,72%	5.32%
4	Meningkatnya tata	Persentase	102,04%	99,10%	2.94%

	kelola pemerintahan desa yang baik	Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik			

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah pelaporan kinaerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100%**	69.67%	69.67%
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	100.00%	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	100.00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di susun**	**100%**	88.24%	88.24%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	13 orang/bulan	92.86%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 laporan	1 laporan	100.00%

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	4 laporan	200.00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	50.00%	50.00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	1 paket	50.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah**	**100%**	210.00%	210.00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3 paket	300.00%
	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	13 paket	260.00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	4 paket	200.00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	9 dokumen	450.00%
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	13 laporan	130.00%

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	50.00%	50.00%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	0 paket	0.00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	100.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	105.26%	105.26%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	4 paket	200.00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 laporan	100.00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	115.79%	115.79%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	6 unit	150.00%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	5 unit	100.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	7 unit	116.67%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	4 unit	100.00%
2	**PROGRAM**	**Tingkat efektifitas**	**92%**	532.61%	578.92%

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**92%**	140.00%	152.17%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	7 laporan	140.00%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**92%**	250.00%	271.74%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	5 dokumen	250.00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Tercapainnya Peaksanaan Urusan Pemerintahan**	**92%**	100.00%	108.70%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 laporan	3 laporan	100.00%

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Efektifitas Pembinaan Desa/Kelurahan**	**100%**	122.22%	122.22%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**100%**	122.22%	122.22%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat daam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyarakatan	7 lembaga kemasyarakatan	100.00%
	Sinkronisasi program kerja dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 dokumen	5 dokumen	250.00%
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**	**92%**	333.33%	362.32%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI**	**92%**	333.33%	362.32%
	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	3 laporan	10 laporan	333.33%

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
	Kecamatan	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**	**92%**	110.00%	119.57%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**JumlahPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**92%**	110.00%	119.57%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	110 orang	110.00%
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Efektifitas Pembinaan Desa/Kelurahan**	**100%**	100.00%	100.00%
	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	**Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	100.00%	100.00%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam	7 dokumen	7 dokumen	100.00%

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
		rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	3 dokumen	150.00%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 dokumen	7 dokumen	233.33%

Adanya beberapa capaian yang melebihi target dikarenakan adanya perencanaan target yang tidak sesuai dengan realisasi yang terjadi, sehingga terjadinya lonjakan pada capaian kinerja laporan. Dan adapula capaian yang tidak tercapai seperti kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dikarenakan faktor penghambatnya yakni dari yang ditergetkan pembeliannya 2 jenis kain, tetapi yang ter-realisasikan hanya 1 jenis kain. Sedangkan untuk kegiatan Pengadaan Mebel ini tidak ada yang ter-realisasikan dari 3 target yang direncanakan, dikarenakan saat di PAK ternyata barang belum tercantum di RKBMD th 2023.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,042,689,239	1,820,155,519	222,533,720	89.11%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,000,000	1,930,000	70,000	96.50%

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,000,000	1,930,000	70,000	96.50%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,720,999,000	1,545,695,102	175,303,898	89.81%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,717,999,000	1,542,975,102	175,023,898	89.81%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,000,000	1,878,000	122,000	93.90%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	1,000,000	842,000	158,000	84.20%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,680,000	4,467,750	212,250	95.46%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4,680,000	4,467,750	212,250	95.46%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109,631,400	108,155,577	1,475,823	98.65%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	982,400	978,000	4,400	99.55%
	Penyediaan Bahan Logistik	34,979,750	34,946,000	33,750	99.90%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,000,250	1,999,300	950	99.95%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,500,000	2,400,000	100,000	96.00%
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	69,169,000	67,832,277	1,336,723	98.07%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37,906,389	29,388,000	8,518,389	77.53%

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan Mebel	4,417,500	0	4,417,500	0.00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33,488,889	29,388,000	4,100,889	87.75%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,430,000	28,262,324	4,167,676	87.15%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,720,000	3,241,000	2,479,000	56.66%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,710,000	25,021,324	1,688,676	93.68%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	135,042,450	131,644,766	3,397,684	97.48%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31,275,800	29,748,000	1,527,800	95.12%
	Pemeliharaan Mebel	3,500,000	3,450,000	50,000	98.57%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,320,000	9,270,000	50,000	99.46%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91,015,150	89,176,766	1,838,384	97.98%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	104,115,000	101,011,632	3,103,368	97.02%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	74,769,500	72,632,066	2,137,434	97.14%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	74,769,500	72,632,066	2,137,434	97.14%

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	13,518,100	12,947,500	570,600	95.78%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	13,518,100	12,947,500	570,600	95.78%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15,827,400	15,432,066	395,334	97.50%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15,827,400	15,432,066	395,334	97.50%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	44,700,300	42,806,563	1,893,737	95.76%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44,700,300	42,806,563	1,893,737	95.76%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat daam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17,825,700	17,749,000	76,700	99.57%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	26,874,600	25,057,563	1,817,037	93.24%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32,872,800	29,990,000	2,882,800	91.23%

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32,872,800	29,990,000	2,882,800	91.23%
	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32,872,800	29,990,000	2,882,800	91.23%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22,890,100	22,785,000	105,100	99.54%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	22,890,100	22,785,000	105,100	99.54%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22,890,100	22,785,000	105,100	99.54%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	85,569,000	84,801,000	768,000	99.10%

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85,569,000	84,801,000	768,000	99.10%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	66,909,000	66,163,500	745,500	98.89%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6,930,000	6,920,000	10,000	99.86%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11,730,000	11,717,500	12,500	99.89%

Untuk realisasi penyerapan anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 56.66% dikarenakan adanya pagu anggaran yang tidak terserap yakni untuk pendanaan honor pptk kasubbag umum, dikarenakan jabatan tersebut kosong. Kemudian untuk realisasi penyerapan anggaran sub kegiatan Pengadaan Mebel sebesar 0.00%, dikarenakan pada saat PAK untuk perubahan belanja modal mebel tidak masuk dalam Renacana Kebutuhan Belanja Modal Daerah tahun 2023.

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Wilangan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kecamatan Wilangan dengan mengacu pada Review Renstra Kecamatan Wilangan Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Wilangan pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 semua indikator masih ada yang belum tercapai, yakni Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan realisasi 88,30.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Wilangan Tahun 2023 sudah memenuhi sasaran startegis yang telah ditargetkan, adapun sasaran startegis yang sudah dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat tidak tercapai pada target akhir renstra 2023.

4.2. SARAN

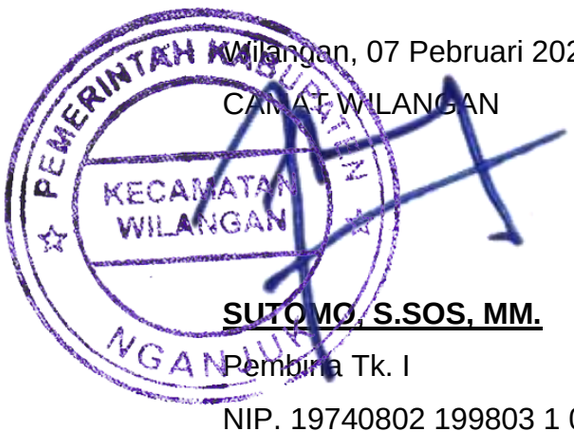
Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. melakukan re-orientasi terhadap program / kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen - dokumen perencanaan dan kinerja;
b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program / kegiatan;

c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Wilangan secara menyeluruh,efektif, dan efesien;
d. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.
e. lebih memperhatikan lagi antara PAK pada pengadaan Belanja Modal Daerah (BMD) dan Rencana Kebutuhan Belanja Modal Daerah (RKBMD) agar tidak terjadi lagi BMD yang tidak dapat di realisasi oleh Kecamatan Wilangan.
f. mempertajam kembali dalam penargetan awal dalam renstra, agar tidak terjadi ketimpangan yang sangat jauh dengan realisasi.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wilangan Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempunaan laporan kami pada tahun mendatang.

Wilangan, 07 Pebruari 2024
CAMAT WILANGAN



SUTOMO, S.SOS, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19740802 199803 1 005